

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



**ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA**



Oleh :

**Dr. HIDAYAT T.**

**SEMINAR POLRI 1991**  
**PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**  
Jakarta, 25 s/d 27 April 1991

KAJIAN SEKTOR INFORMAL :  
ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA \*)

OLEH : HIDAYAT \*\*)

1. Apa tujuan makalah 2. Apa pengertian, definisi, dan ciri pokok sektor informal 3. Bagaimana sektor informal lahir 4. Bagaimana memasyarakatkan sektor informal ? 5. Apakah sektor pertanian termasuk sektor informal 6. Berapa besar daya absorpsi kesempatan kerja sektor informal 7. Apa potensi sektor informal ? 8. Pendekatan apa yang perlu dipakai dalam membantu sektor informal 9. Apa prospeknya 10. Kesimpulan dan Saran Kebijakan 11. Daftar Bacaan

1. APA TUJUAN MAKALAH ?

Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, berencana, bertahap, dan berkesinambungan sejak awal Orde Baru, telah memasuki Pelita V yang merupakan tahapan pelita terakhir era "Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama" (1969-94). Dalam

\*) Makalah disampaikan dalam "SEMINAR POLRI 1991 TENTANG KONSEPSI STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA : ASPEK SOSIAL BUDAYA", diselenggarakan oleh POLRI, tanggal 25-27 April 1991, bertempat di Auditorium PTIK, di Kebayoran Baru (Jakarta).

\*\*) Penulis adalah Kepala, Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (Unpad). Juga sebagai anggota, Dewan Produktivitas Nasional (Depnaker); anggota, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (KADIN Indonesia); penasehat, AP3I (Asosiasi Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Indonesia); anggota DPP Perhimpunan Management Personalia Indonesia (PMPI); dan Dosen SESKODAD.

pembangunan 25 tahun tahap pertama, titik sentral diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan mewujudkan keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri (pengolahan) serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, sedangkan pembangunan bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi.

Dari hasil dan pengalaman pembangunan selama ini serta proyeksi hasil pembangunan pada akhir pembangunan jangka panjang tahap pertama, diketahui telah banyak mencapai kemajuan yang berarti, antara lain : [1] tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, [2] daya tahan dan struktur ekonomi yang tahan banting, [3] tersedianya kebutuhan pokok rakyat terutama beras dan pendidikan dasar, [4] pembatasan jumlah anak per keluarga, [5] terciptanya stabilitas nasional yang kondusif untuk perkembangan demokrasi dan dunia usaha, dan tidak kalah pentingnya adalah [6] meletakkan kerangka dasar untuk mewujudkan mental kemandirian kehidupan berbangsa.

Perlu disadari bahwa dalam proses pembangunan, sering kali timbul berbagai permasalahan (baru) yang disebabkan oleh adanya pengaruh faktor lingkungan strategis, dan adanya dampak negatif pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang muncul ialah bagaimana sumber-sumber pembangunan yang telah berhasil diciptakan melalui pembangunan ekonomi dapat ditransformasikan bagi pembangunan bidang sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.

Untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan maka selain diper-

lukan aparat dan aparatur pemerintah yang tanggap dan berwibawa, juga sangat diperlukan keikutsertaan manusia dan masyarakat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan menurut hak dan kewajibannya secara konstitusional yang bersumber dari kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dirumsukan dalam butir-butir Pancasila. Dengan demikian, pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya bertujuan "to humanize humanity".

Berdasarkan pola pikir di atas, maka tepat sekali rumusan GBHN 1988 yang telah mengangkat sumberdaya manusia sebagai fokus utama dalam "Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua" (1994-2019). Walaupun dalam GBHN 1988 telah dirumuskan sasaran utama pembangunan 25 tahun mendatang, namun beberapa hal yang mendasar masih memerlukan penegasan, pemahaman, dan penyamanan persepsi, antara lain mengenai penentuan titik berat pembangunannya yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial budaya.

Secara umum, kondisi sosial budaya pada dewasa ini diwarnai oleh meningkatnya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial budaya cenderung lebih terbuka dan lebih dinamis yang ditandai dengan semakin lajunya mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan dalam rangka alih peran pelaksanaan pembangunan antara lain karena terbatasnya peluang penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, motivasi, kepercayaan kepada diri sendiri, rasa tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya produktivitas kerja.

Dengan menggunakan pendekatan sumberdaya manusia yang dikaitkan dengan aspek sosial budaya maka penulis tertarik untuk mengkaji kehidupan dan penghidupan sebagian dari masyarakat Indonesia, yang sehari-harinya "bergelut" dengan berbagai hambatan dan gangguan (plus ancaman) untuk sekedar "mengisi perut", yakni di sektor informal. Dari hasil pengkajian tersebut, kemudian akan dicoba melihat perspektif peranan sektor informal baik selama berlangsungnya proses pembangunan jangka panjang kedua maupun pada akhir era tahapan pembangunan tersebut.

Makalah ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan suatu "overview" tentang konsep, ruang lingkup, dan perkiraan kesempatan kerja sektor informal. Penulis masih merasa perlu untuk memberikan tinjauan umum ini dengan maksud untuk mencegah terjadinya "mis-use and abuse" terhadap pengertian sektor informal khususnya dalam konteks ekonomi Indonesia. Bagian kedua dari makalah ini akan mengetahui perspektif peranan sektor informal dalam tahapan pembangunan jangka panjang kedua.

## 2. APA PENGERTIAN, DEFINISI, DAN CIRI POKOK SEKTOR INFORMAL

Bagi para pemerhati dan peneliti tentang sektor informal di Indonesia yang sangat mendambakan agar sektor tersebut memperoleh pengakuan -- dari Pemerintah dan masyarakat luas -- yang setara dengan mitranya yakni sektor formal, maka orientasi pembangunan yang bertujuan mengangkat kehidupan dan penghidupan

para pelaku ekonomi di sektor informal -- seperti akhir-akhir ini banyak dilontarkan oleh para perencana dan perumus kebijaksanaan pembangunan di Indonesia -- sungguh merupakan "hawa segar" yang telah lama dinanti-nantikan.

Mengamati perubahan sikap (pemerintah) dari yang tadinya bersifat "ignorance" menjadi "awareness" -- perihal sumbangan positif sektor informal terhadap pembangunan nasional -- dan kemudian berkembang lagi menjadi suatu "political acceptance" maka kini tinggal menyusun suatu strategi dan kebijaksanaan nasional dan regional untuk memasukkan sektor informal dalam kebijaksanaan pembangunan nasional, yang terpadu dengan sektor formal.

Kalau semula dalam tahun 70-an kebijaksanaan pembangunan mencoba menciptakan suatu keadaan "memenangkan" sektor formal dan "mengalahkan" sektor informal maka mulai dasawarsa 90-an dan mudah-mudahan sampai dengan akhir periode Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua (1993-2018), perlu diciptakan kebijaksanaan yang menuju kepada "a win-win solution" bagi kedua sektor tadi. Kebijaksanaan kearah itu, di satu pihak harus mampu menggabungkan kekuatan ekonomi yang telah dimiliki oleh kedua sektor tersebut untuk lebih memantapkan laju pembangunan nasional, dan di lain pihak mentransformasikan kelemahan yang masih melekat di masing-masing menjadi kekuatan ekonomi. Demikian pula, masalah-masalah yang sering menghambat proses pembangunan perlu dirubah menjadi peluang ekonomi.

Sebuah bukti bahwa sektor informal kini semakin populer di kalan-

gan pemerhati pembangunan adalah seringnya terselenggara berbagai seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah di berbagai tempat di Indonesia yang membahas sektor tersebut. Setelah kini dimiliki suatu "pengakuan politis" maka perlu dihindari penyakit klasik yakni sifat "complacent". Harus disadari bahwa masih diperlukan proses yang panjang untuk benar-benar menciptakan situasi yang mengarah kepada "a win-win solution".

Contoh bahwa para pemimpin Indonesia sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap sektor informal adalah dengan membaca beberapa "pernyataan" yang bersifat mendukung yang pernah disampaikan oleh pejabat teras Indonesia yang dimuat di media masa (dalam dan luar negeri) :

"Sektor informal harus dilindungi .....bukan dikejar-kejar atau dihancurkan, tetapi justru akan diberi tempat diatur secara baik, serta diakui keberadaannya." [mantan Menteri Tenaga Kerja Sudomo, dimuat di Harian Kompas, tanggal 20 Agustus 1986, hal. 1].

"In the past, city authorities have sought to stem the flow of urbanisation by strict and limited issuance of the identity cards needed in the search for work and by limiting the growth of the informal economic sector through frequent raids.....the potential of this informal sector has been greatly overlooked... the sector would now be considered in planning ...." [Menteri KLH Emil Salim, dimuat di Singapore's Straight Times, tanggal 4 Oktober 1986, halaman 8].

"Sektor informal ternyata telah dapat berfungsi sebagai katup penyelamat khususnya dalam aspek kesempatan kerja pada periode ekonomi Indonesia sedang menghadapi ujian berat" [Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, dimuat di Harian Karya bulan Agustus 1988]

Seperti diketahui, asal usul konsep sektor informal adalah berkaitan dengan konsep pembangunan ekonomi. Dalam ekenario pemban-

gunakan yang mengandalkan kepada pendekatan "top and trickle-down" maka sektor formal dianggap sebagai "engine of growth". Oleh karena itu sebagian besar dari arus investasi diarahkan secara "top-down" ke sektor formal. Hasil empirik menunjukkan bahwa sektor informal ternyata juga mempunyai potensi sendiri terutama dalam : [1] penyediaan lapangan kerja, [2] pelaksanaan arus investasi skala kecil (termasuk yang recycling sampah), dan [3] memproduksi barang-barang yang relatif banyak menyerap komponen upah (wage-good), dan [4] tempat "on the job training" bagi calon-calon wirausaha.

Pembangunan yang mengandalkan kepada pendekatan "top down" cenderung menganggap bahwa organisasi pemerintahlah yang harus berperan aktif dalam menyampaikan "trickle-down" hasil pembangunan sampai ke berbagai pelosok desa. Hasil empirik menunjukkan bahwa terdapat berbagai enklave dalam masyarakat yang tidak sampai tersentuh oleh jangkauan pelayanan organisasi pemerintah. Adapun kebutuhan "wong cilik" yang tidak terjangkau oleh aparat pemerintah ternyata sebagian terlayani oleh organisasi yang bersifat "grass-root" yakni organisasi yang berada di luar struktur formal (birokrasi pemerintah). Organisasi tersebut kini dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di kalangan pemerhati dan peneliti tentang sektor informal sudah terdapat semacam konsensus (tidak tertulis) perihal dua hal. Pertama, bahwa sektor informal pada hakikatnya merupakan konsep ekonomi maka oleh karena itu kegiatannya dapat dikelompokkan menurut "Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia" (KLUI) terbitan



BPS. Kedua, bahwa yang dianalisis adalah perilaku "unit usaha" dan bukan "keluarga" atau "individu". Tetapi mengingat sektor informal pada umumnya terdiri dari unit usaha swakarya atau mandiri (one-man-enterprise) maka dengan sendirinya perilaku unit usaha akan identik dengan perilaku individu.

Perihal definisi, terus terang, belum ada "kebulatan pendapat". Menurut hemat penulis, kesulitan mencari rumusan yang dapat diterima oleh banyak pihak berhubungan dengan kriteria yang dapat dipakai untuk membedakan apakah suatu unit usaha termasuk sektor formal atau informal. Kesulitan itu ditambah lagi karena dalam pengertian "kriteria" sendiri terkandung dua hal : [i] kriteria konseptual (berhubungan dengan definisi teoretis), dan [ii] kriteria operasional atau diagnostik (berhubungan dengan definisi kerja atau operasional).

Sampai sekarang menurut penulis, baru Sethuraman yang relatif berhasil merumuskan definisi teoritis tentang sektor informal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia definisinya menjadi sebagai berikut :

Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan, dan faktor ketrampilan [Sethuraman, 1981].

Kriteria yang sering dipakai untuk membedakan sektor formal dan informal adalah yang dipakai oleh ILO yakni "bantuan ekonomi".

Dilihat dari kepentingan perumusan kebijaksanaan, menurut hemat penulis, kriteria yang dipakai oleh ILO dianggap tidak begitu relevan lagi. Juga dilihat dari segi kebijaksanaan, kriteria proteksi sebagai rumusan dan pengertian sektor informal menimbulkan dilema. Di satu pihak, dilihat secara de-facto pemerintah telah menyediakan fasilitas bantuan terhadap sektor informal. Tetapi di lain pihak, menurut berbagai hasil penelitian yang bersifat mikro, sering terungkap informasi bahwa banyak kelompok sasaran belum dapat menikmati bantuan tadi.

Jadi, menurut penulis, masalahnya adalah bukan perihal "ada" atau "tidak ada" bantuan ekonomi dari pemerintah melainkan yang lebih penting dan lebih relevan (dilihat dari kepentingan kebijaksanaan) adalah faktor "accessibility" terhadap bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Jadi dalam konteks pembangunan, yang relevan ialah mencari jawaban dari pertanyaan : Apakah bantuan ekonomi dari pemerintah itu sampai ke kelompok sasaran yang telah ditentukan menurut rencana ? Mengapa masih ada pihak yang belum menerimanya ? Mengapa masih ada pihak yang telah menerima bantuan itu tetapi masih tetap lemah (belum berdikari) ?

Oleh karena itu penulis menyarankan agar untuk Indonesia selain definisi Sethuraman perlu ditambahkan definisi kedua [Hidayat, 1983c] yang terdiri dari tiga butir :

- (1) Sektor informal ialah sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi

dari pemerintah,

- (2) Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak punya access) bantuan meskipun pemerintah telah menyediakannya, dan
- (3) Sektor yang telah menerima bantuan tetapi bantuan itu belum sanggup membuat sektor itu berdikari (tetap gurem).

Jadi kriteria yang dipakai dalam definisi ini bukan ditekankan pada "ada atau tidak adanya bantuan" melainkan kepada "accessability dan kualitas bantuan". Sekali lagi penulis katakan bahwa kriteria yang dipakai dalam definisi di atas bukan menekankan pada formalitas "ada" atau "tidak ada" bantuan yang disediakan oleh pemerintah melainkan fokusnya tertuju pada kriteria "accessability" bagi sektor informal terhadap penggunaan bantuan yang telah disediakan dan juga perihal kualitas bantuan.

Apa ciri-ciri pokok sektor informal di Indonesia? Pada tahun 1978 penulis telah merumuskan 11 (sebelas) ciri pokok sektor informal. Rumusan tersebut kemudian oleh Biro Pusat Statistik telah dipakai sebagai landasan survei nasional tentang pekerja sektor informal di Indonesia. Kini ciri-ciri pokok tersebut telah menjadi baku, yakni :

- (1) Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- (2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.

- (5) Unit usaha sudah keluar dan masuk dari satu sub-sektor ke lain sub sektor.
- (6) Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
- (7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
- (8) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan di peroleh dari pengalaman sambil bekerja.
- (9) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan "one-man-enterprise" dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- (10) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
- (11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Timbul pertanyaan yang sering diajukan : Apa akibatnya kalau sektor informal diberi izin usaha atau bantuan kredit dari Pemerintah? Berdasarkan karakteristik tersebut, izin usaha dan kredit baru merupakan dua ciri dari sektor informal. Masih ada sembilan ciri lainnya sebelum sektor informal dapat disebut "telah diformalkan". Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan yang membantu sektor informal, an sich, belum berarti hilangnya sektor informal (ingat tiga butir definisi di bagian muka).

Yang paling sulit ialah menghilangkan ciri skala ekonomi yang termasuk "gurem". Diperlukan waktu puluhan tahun untuk merubah ciri tadi menjadi "modern" (tetapi tetap berskala kecil). Di negara yang maju pun (misalnya USA) dalam keadaan resesi ekonomi yang parah -- seperti terjadi sekarang -- ternyata timbul kembali

kegiatan yang mirip sektor informal. Karakteristiknya berbaur dengan kegiatan yang mencoba menghindari pembayaran pajak sehingga di negara maju sering kegiatan sektor informal disebut "ekonomi di bawah tanah" (underground economy). Di bawah ini disajikan perbedaan pokok tentang karakteristik kegiatan di sektor informal dengan sektor formal :

### KONSEPTUALISASI PERBEDAAN KARAKTERISTIK

#### SEKTOR INFORMAL DAN FORMAL

Karakteristik	Sektor Formal	Sektor Informal
Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat Karya
Organisasi	Birokrasi	Menyerupai organisasi keluarga
Kredit	Dari lembaga keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
Serikat pekerja	Sangat berperan	Tidak berperan
Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada
Hubungan dengan desa	one-way-traffic untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
Sifat wira-swasta (berdikari)	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor	Berdikari
Persediaan barang	Jumlah besar dan kualitas baik	Jumlah kecil dan kualitas berubah-ubah
Hubungan kerja majikan-pekerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan asas saling percaya

Sumber : Hidayat (1978).

### 3. BAGAIMANA SEKTOR INFORMAL LAHIR ?

Sektor informal timbul karena ada dualisme dalam pembangunan ekonomi yang diterapkan dalam zaman kolonial. Ciri ekonomi kolonial adalah adanya dualisme antara kota (yang maju dan tempat lokasi industri barang konsumsi) dan desa (yang terbelakang dan tempat dominasi tenaga kerja berlebihan). Di daerah pedesaan juga ada dualisme lain yaitu antara ekonomi enklave (lokasi perkebunan dan usaha pertambangan modern) dan ekonomi tradisional (lokasi petani-peternak-pelayan-pengrajin gurem).

Setelah merdeka, di banyak negara yang sedang berkembang diterapkan suatu strategi pembangunan yang memacu pada pencapaian pertumbuhan GNP setinggi mungkin. Untuk mencapai hal tersebut maka dicari kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pertumbuhan nilai tambah yang relatif tinggi. Pada umumnya kegiatan ekonomi yang relatif banyak menggunakan modal dan teknologi maju -- seperti sektor Industri (pengolahan) -- mampu mencapai pertumbuhan nilai tambah yang relatif tinggi. Berdasarkan orientasi pemikiran semamam itu maka banyak negara memilih strategi industrialisasi yang dipercepat.

Mengingat daerah perkotaan telah memiliki fasilitas prasarana dan sarana yang lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan maka para investor cenderung untuk memilih lokasi industri di daerah perkotaan pula. Industri di kota itu kemudian mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja yang berasal dari desa

yang pada umumnya adalah buruh tani yang tuna lahan. Para pencari kerja asal desa rata-rata mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang relatif rendah, sedangkan kegiatan di sektor Industri mensyaratkan calon pekerja yang berpendidikan relatif tinggi. Akibatnya, banyak pelamar tidak dapat memenuhi persyaratan tadi. Kelompok pencari kerja ini lama kelamaan membengkak sehingga di (pinggiran) daerah perkotaan timbul "kantong-kantong orang desa". Untuk mempertahankan hidupnya maka kelompok pencari kerja tersebut mencoba mengadu nasib dengan berusaha sendiri membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ada kalanya, produksi barang dan jasa sektor "baru" tersebut dipakai juga sebagai masukan oleh sektor industri kota.

Dengan demikian di kota timbul dualisme ekonomi baru yaitu sektor yang mendapat proteksi ekonomi dari Pemerintah (Sektor Formal) dan sektor yang tidak mendapat proteksi ekonomi (Sektor Informal). Jadi timbulnya sektor informal di daerah perkotaan mula-mula karena alasan kesempatan kerja. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha terbitan EPS maka ruang gerak sektor informal di daerah perkotaan meliputi 5 sub-sektor ekonomi, yakni : industri pengolahan (termasuk kerajinan rakyat), bangunan, jasa (perorangan, kemasyarakatan, hiburan), perdagangan (keliling dan menetap), dan angkutan (tenaga manusia dan hewan). Sedangkan di desa selain lima sub sektor itu ditambah lagi satu sub sektor yaitu pertambangan (khususnya pertambangan batu dan pasir).

#### 4. BAGAIMANA MEMASYARAKATKAN KONSEP SEKTOR INFORMAL ?

Sejak sektor informal diperkenalkan di Indonesia oleh sekelompok peneliti perintis pada tahun 1976-78 yakni Sethuraman (ILO); Sucipto Wirodarjono (pada waktu itu di KSS DKI); Moir (Leknas); Hidayat (PPSL-Unpad); dan dalam periode 1979-81 dimasyarakan oleh lembaga perintis seperti Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Lembaga Studi Pembangunan, dan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (PPSL) Unpad, maka perhatian terhadap sektor tersebut dikalangan para pemerhati, perencana, dan perumus kebijaksanaan pembangunan kian meningkat.

Untuk memasyarakatkan konsep sektor informal di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini telah dilakukan berbagai kegiatan seperti :

- [a] Menyediakan biaya penelitian atas persetujuan Bappenas yang disalurkan melalui Departemen Tenaga Kerja dan LIPI pada tahun 1975, 1976, 1977;
- [b] Menyelenggarakan Seminar Sektor Informal tingkat Nasional di Jakarta, diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, dan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia (Unpad) pada bulan Maret 1978;
- [c] Seminar sektor informal tingkat ASEAN yang diselenggarakan bersama oleh Departemen Tenaga Kerja, Setnas ASEAN Deparlu, ILO, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, pada bulan Desember 1978 di Jakarta;
- [d] Menyelenggarakan Karya Latihan Wartawan (KLW) oleh PWI agar diperbanyak tulisan tentang sektor informal oleh para wartawan;



- [e] Memasukan pembinaan sektor informal sebagai salah satu agenda dalam MAKSI ke-7 (Musyawarah antar Kota seluruh Indonesia) yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1981 di Bandung;
- [f] Lokakarya Nasional tentang angkatan kerja (termasuk sektor informal) yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Kantor Meneg Ristek, BKKBN, dan LEKNAS pada bulan Januari 1983 di Jakarta;
- [g] Lokakarya Nasional tentang penyusunan kebijaksanaan terpadu sektor informal yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Meneg KLH pada bulan Januari 1985 di Jakarta;
- [h] Melaksanakan survai nasional tentang pekerja yang bergerak di sektor informal pada tahun 1982 oleh Biro Pusat Statistik yang hasilnya dipublikasikan pada bulan Februari 1986; dan
- [i] Seminar Nasional tentang kependudukan, urbanisasi, dan sektor informal yang diselenggarakan oleh Kantor Meneg KLH pada bulan Oktober 1986 di Jakarta.
- [j] Seminar Sektor Informal yang diselenggarakan oleh KNPI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta.

Selain yang disebutkan di atas, maka telah pula dirintis berbagai program pembinaan dan latihan yang sebagian dibiayai oleh dana luar negeri a.l. : [i] program BIPIK dilingkungan Dep. Perindustrian yang ditujukan ke sektor industri kecil/kerajinan rakyat (bantuan dari Bank Dunia dan UNDP), [ii] program FDP (Provincial Development Program) dilingkungan Depdagri yang ditujukan ke daerah terbelakang di suatu propinsi (bantuan dari US-AID), [iii] proyek Perbinikon dilingkungan Dep.FU yang ditujukan kepada kelompok mandor sektor konstruksi (bantuan dari Bank Dunia), [iv] P3GEL dili

## 5. APAKAH SEKTOR PERTANIAN TERMASUK SEKTOR INFORMAL ?

Munculnya sektor informal berkaitan dengan kebijaksanaan yang terlalu cepat hendak meninggalkan sektor Pertanian dan memasuki kegiatan sektor Industri karena sektor terakhir ini dianggap mampu menciptakan nilai tambah yang besar. Bukti empiris menunjukkan bahwa dengan menyediakan berbagai kemudahan dalam penanaman modal fisik maka memang terjadi perubahan dalam struktur produksi yakni saham sektor industri mulai meningkat dan saham sektor pertanian menurun dinyatakan dalam GDP.

Tetapi pergeseran dari pertanian ke industri dalam bidang kesempatan kerja tidak berjalan secepat pergeseran dalam saham nilai tambah sektoral. Akibatnya, arus tenaga kerja yang meninggalkan pertanian (desa) tidak tertampung di industri kota. Timbullah sektor informal di daerah perkotaan. Kemudian, karena pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan kesempatan kerja di sektor pertanian desa atau di ekonomi enklave desa tidak dapat menampung arus pencari kerja "baru" maka mulai berkembang kegiatan di luar sektor pertanian. Jadi muncul sektor informal desa. Proses industrialisasi di dunia ketiga yang menjerus kepada pengangguran daerah perkotaan disebut oleh Myrdal sebagai "pre-mature industrialization".

Dari uraian di atas jelas dari evolusinya bahwa sektor informal dipisahkan dari kegiatan sektor pertanian. Lagi pula dilihat dari pemecahannya, maka masalah di sektor pertanian selalu

berhubungan dengan kualitas lahan, kualitas air, dan kualitas lingkungan. Sedangkan di sektor informal masalahnya sedikit sekali berhubungan dengan berbagai kualitas tadi.

Oleh karena itu para perintis penelitian sektor informal tidak memasukkan sektor pertanian dalam sektor informal. Meskipun demikian, per definisi yang telah disebutkan di muka, memang kegiatan sektor pertanian berskala relatif kecil dapat dimasukkan dalam konsep sektor informal. Tetapi untuk kepentingan kebijaksanaan pembangunan ekonomi, penulis tetap berpendirian bahwa sebaiknya sektor pertanian dipisahkan dari konsep sektor informal.

#### 6. BERAPA BESAR DAYA ABSORPSI KESEMPATAN KERJA SEKTOR INFORMAL ?

Dalam dasawarsa 70-an, berdasarkan perkiraan kasar [Hidayat, 1983a] kecenderungan jumlah pekerja yang mengadu nasib di sektor informal (kota dan desa), kalau dihitung dalam persentase menunjukkan arah menurun yakni dari 63% (tahun 1971) menjadi 53% (tahun 1980) tetapi kalau dinyatakan dalam angka absolut menunjukkan arah meningkat yakni dari 23,7 juta menjadi 27,2 juta.

Angka persentase yang menurun tersebut tentu ada kaitannya dengan "windfall-profit" hasil ekspor migas yang telah memungkinkan anggaran belanja pemerintah untuk sektor pembangunan terus mengalami peningkatan. Selama periode yang sama, jumlah pekerja yang terserap di sektor formal telah meningkat dari 14

juta (tahun 1971) menjadi 24 juta (tahun 1980).

Menarik juga untuk dibahas perihal dampak resesi ekonomi dalam dasawarsa yang lalu terhadap daya serap kesempatan kerja sektor informal. Seperti diketahui, tahun 1982 merupakan tahun awal dari periode resesi ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan PDB (dalam harga konstan 1983) telah anjlok dari ketinggian 7,1% dalam tahun 1981 menjadi minus 0,3% dalam tahun 1982. Setelah itu kegiatan ekonomi mulai meningkat lagi. Tahun 1987 mulai kebangkitan ekonomi Indonesia.

Situasi ekonomi dasawarsa 80-an yang kurang cerah ini tentu menimbulkan masalah pelik di "pasar kerja". Kesempatan kerja yang "demand-induced" terutama di sektor formal -- melalui kekuatan multiplier APBN -- menjadi berkurang. Menurut perkiraan resmi [BPS, 1986], pada tahun 1982 pekerja di sektor formal berjumlah kurang lebih 19,7 juta (atau 34%). Kalau dibandingkan dengan tahun 1980, maka jumlah tersebut telah mengalami penurunan. Di lain pihak, pekerja di sektor informal pada tahun yang sama telah meningkat menjadi 38,2 juta (tidak termasuk "buruh pertanian") atau sebesar 66%. Kalau diasumsikan bahwa selama periode 1983-86, kurang lebih satu juta pencari kerja "baru" setiap tahun masuk sektor informal maka pada awal tahun 1987 jumlah pekerja sektor informal diperkirakan mencapai 42,2 juta.

Dilihat dari aspek penyediaan lapangan kerja, memang sektor informal telah mampu melaksanakan fungsinya. Tetapi, aspek kesempatan kerja tanpa ditopang oleh aspek pendapatan yang

"wajar" tentu akan mengarah kepada proses "dis-investment" baik dalam bentuk "human capital" maupun "non-human capital".

Berapa pekerja wanita di sektor informal? Dalam tahun 1982, dari 20,7 juta pekerja wanita se Indonesia (desa dan kota) kurang lebih 17,7 juta (atau 85%) bekerja di sektor informal. Enam dari sepuluh pekerja wanita di sektor informal mencari nafkah sebagai "penerima upah", sedangkan sisanya hidup sebagai "wiraswasta" baik bersifat mandiri atau dibantu oleh anggota rumah tangga (tanpa memiliki buruh tetap). Meskipun jumlahnya berada di bawah laki-laki dengan status yang sama yakni dengan perbandingan satu lawan tiga, tetapi harus diakui bahwa peranan kelompok wanita tersebut adalah cukup potensial.

Pada umumnya wanita sektor informal memilih kegiatan di sektor yang sesuai dengan "bakat alam" yakni perdagangan terutama yang berkaitan dengan "makanan, jajanan, dan minuman". Peneliti Barbara Chapman secara khusus mengamati pekerja wanita penjual makanan di Kodya Bogor pada tahun 1983. Hasil penelitiannya

- [a] setiap unit usaha (perorangan) rata-rata melayani 16 orang penduduk;
- [b] 85% lokasi berjualan di depan rumah atau sekitar rumah sendiri atau membawa dagangannya berkeliling ke daerah pemukiman, sedangkan sisanya 15% beroperasi di daerah pemukiman dengan menggunakan gerobak, keranjang, pikulan;
- [c] wanita penjual bekerja lebih lama dari laki-laki.

Dibandingkan dengan pedagang laki-laki, pedagang wanita kurang

mobil. Kelihatannya, ada keinginan untuk tidak terlalu jauh beroperasi dari rumah. Faktor ini pula yang mungkin menyebabkan kaum wanita tidak banyak melakukan ulang-alik. Dari studi ulang-alik ke Bandung, kurang lebih 70% adalah laki-laki [Agus dan Mulyamah, 1986].

## 7. APA POTENSI SEKTOR INFORMAL ?

Selama ini sektor informal dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak. Selain aspek kesempatan kerja, ternyata sektor tersebut juga dapat memberikan potensi besar dalam pemasukan kas daerah.

Sebagai contoh adalah kasus DKI Jakarta. Berdasarkan Sensus Kaki-5 di DKI tahun 1986 ada sekitar 135 ribu pedagang. Menurut Perda No.5 tahun 1978 disusul dengan SK Gubernur DKI No.968 tahun 1986 jumlah retribusi Kaki-5 adalah sebesar Rp.500 per hari. Secara teoretis, dengan asumsi sebulan ada 25 hari dan pembayar retribusi sebanyak 100 ribu, maka hasil retribusi Kaki-5 yang dapat masuk kas daerah adalah sebesar Rp. 1,25 milyar/bulan atau Rp.15 milyar/tahun. Tetapi dalam APBD DKI tahun 1990/91 hanya ditargetkan sekitar Rp.1,2 milyar dengan jumlah pembayar sebesar 14 ribu pedagang.

Dengan upaya perbaikan administrasi pungutan retribusi oleh Pemda DKI maka masih tersedia sebuah potensi yang relatif untuk

menambah sumber pendapatan asli daerah. Sebuah bukti lain untuk memperlihatkan potensi ekonomi Kaki-5 di DKI ialah statement Wagub DKI Herbowo yang mengatakan bahwa diperkirakan perputaran usaha Kaki-5 di DKI (tahun 1990) mencapai kurang lebih Rp.6 milyar/sehari (Harian Sinar, Januari 1991).

#### 8. PENDEKATAN APA YANG PERLU DIPAKAI DALAM MEMBANTU SEKTOR INFORMAL ?

Perlu disadari bahwa kegiatan yang termasuk sektor informal bersifat heterogin. Di daerah perkotaan dapat dibedakan lima sub-sektor : perdagangan (menetap dan keliling), jasa (perorangan, masyarakat, dan bisnis), angkutan, bangunan, dan industri kecil. Untuk tiap kegiatan diperlukan instrumen kebijaksanaan yang berbeda.

Kegiatan yang sangat memerlukan pendekatan spasial (space) adalah perdagangan, jasa, dan industri kecil. Sedangkan kegiatan angkutan memerlukan jalur angkutan. Kalau kegiatan bangunan pada umumnya tempat bekerjanya sudah space-oriented. Bagi kelompok terakhir yang sangat penting ialah peningkatan ketrampilan.

Terbesar dari kegiatan sektor informal kota adalah berkaitan dengan perdagangan eceran. Kegiatan perdagangan eceran di daerah perkotaan secara konsepsional terdiri dari dua sub-sektor yakni yang termasuk formal dan informal. Keduanya, secara hakiki seharusnya dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.

Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa kegiatan perdagangan eceran sektor informal (Kaki-5 dan asongan) cenderung mengganggu ketertiban umum, maka menurut hemat penulis, esemrawutan yang terjadi di sektor tsb karena Pemda hingga kini belum memiliki sebuah POLA PERDAGANGAN ECERAN (lihat Hidayat, Prisma, Juli, 1987).

Jadi membenahi kegiatan perdagangan sektor informal harus dimulai dengan menyusun sebuah pola perdagangan eceran. Dengan adanya pola tadi maka bukan saja akan terjadi keserasian antara perdagangan formal dan informal melainkan juga antara sektor perdagangan di satu pihak dan sektor lainnya yang saling berhubungan (seperti pola angkutan dan pola pemukiman).

Perdagangan eceran merupakan kegiatan yang relatif padat karya. Karena sifat dari perdagangan eceran adalah mempertemukan "penjual" dan "pembeli" maka kegiatan itu perlu didukung oleh fasilitas "spasial". Selain faktor ini, sifat dari perdagangan eceran adalah berorientasi ke konsumen. Sedangkan "waktu berbelanja" golongan konsumen sangat bervariasi tergantung dari komoditi yang ingin dibeli dan waktu yang disediakan. Jadi selain berorientasi ke "space" juga memerlukan "rotasi waktu" yang disesuaikan dengan pola belanja konsumen.

Dengan dua variabel tadi (space dan waktu) maka kegiatan sektor angkutan yang menuju pusat perdagangan eceran perlu pula disesuaikan. Tanpa ada keserasian antara pola angkutan dan pola



perdagangan eceran maka akan terjadi kesemrawutan seperti yang kita saksikan selama ini di tiap kota di Indonesia.

Perlu disadari bahwa komoditi yang terlibat dalam kegiatan perdagangan sangat bervariasi. Cara mengangkut komoditi dari daerah produsen ke pusat perdagangan eceran juga bervariasi. Oleh karena itu perlu ada kespesifikan tentang lokasi perdagangan. Hanya pusat perbelanjaan yang bertipe swalayan yang memungkinkan mengkombinasikan beberapa komoditi dalam satu lokasi. Tetapi prinsip yang dipakai ialah adanya pembagian wilayah.

#### 9. APA PROSPEK SEKTOR INFORMAL

Sejak Indonesia memprakarsai penyelenggaraan seminar Asean (yang pertama) tentang sektor informal pada bulan Desember 1978 di Jakarta, perhatian terhadap sektor tersebut telah menunjukkan arah yang meningkat baik sebagai objek penelitian maupun sebagai kelompok sasaran pembangunan.

Dalam dasawarsa 70-an, berdasarkan perkiraan kasar (Hidayat, 1983) kecenderungan jumlah pekerja yang mengadu nasib di sektor informal (kota dan desa), kalau dihitung dalam persentase menunjukkan arah menurun yakni dari 63% (tahun 1971) menjadi 53% (tahun 1980) tetapi kalau dinyatakan dalam angka absolut menunjukkan arah meningkat yakni dari 23,7 juta menjadi 27,2 juta. Angka persentase yang menurun tersebut tentu ada kaitannya dengan "windfall-profit" hasil ekspor migas yang telah memung-

kinkan anggaran belanja pemerintah untuk sektor pembangunan terus mengalami peningkatan. Seandainya, Indonesia (dan dunia) tidak mengalami resesi ekonomi seperti yang dialami sekarang, maka besar kemungkinan angka persentase pekerja sektor informal pada awal tahun 1986 berada di bawah 50% (lebih rendah dari sektor formal).

Tetapi kenyataannya, angin resesi telah menembus ke berbagai pelosok kehidupan dan penghidupan ekonomi masyarakat. Untuk memulihkan ekonomi dalam negeri, maka Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijaksanaan yang cukup fundamental yang pada intinya ingin mengurangi "penyakit" ekonomi biaya tinggi. Situasi ekonomi dasawarsa 80-an yang kurang cerah ini tentu menimbulkan masalah pelik di "pasar kerja". Kesempatan kerja yang "demand - induced" terutama di sektor formal -- melalui kekuatan multiplier APBN -- menjadi berkurang. Menurut perkiraan resmi, pekerja di sektor informal pada tahun 1982 adalah lebih besar dibandingkan dengan dasawarsa 70-an (lihat laporan BPS, 1986).

Kalau di asumsikan bahwa selama periode 1983/83, kurang lebih satu juta pencari kerja "baru" setiap tahun masuk sektor informal maka menurut perkiraan penulis jumlah pekerja sektor informal pada awal tahun 1987 adalah sebesar 42,2 juta (perkiraan Hidayat).

Dilihat dari aspek penyediaan lapangan kerja, memang sektor telah mampu melaksanakan fungsinya. Tetapi, aspek kesempatan

kerja tanpa ditopang oleh aspek pendapatan yang "wajar" tentu akan mengarah kepada proses "dis-investment" baik dalam bentuk "human capital" maupun "non-human capital". Menurut konsep barang "yang diperdagangkan" (traded good) dan "tidak diperdagangkan" (non-traded good) maka barang yang diperjual belikan di sektor informal termasuk kategori yang disebut terakhir.

Perlu diperhatikan bahwa mengingat semua paket kebijaksanaan ekonomi dan keuangan sejak Januari 1982 pada hakekatnya bertujuan untuk mendorong dan melindungi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang "yang diperdagangkan" -- barang yang dijual di pasar internasional -- maka dengan sendirinya paket tadi kurang menyentuh kegiatan sektor informal. Dengan 42,2 juta pekerja menyambung hidupnya dari sektor informal maka sudah selayaknya untuk dipikirkan suatu paket kebijaksanaan yang dapat mengangkat pekerja di sektor informal.

Untuk tahap pertama, penulis mengusulkan suatu paket kebijaksanaan yang terbatas pada kegiatan sektor informal di daerah perkotaan. Menurut data BPS, di luar sektor Pertanian, lapangan yang usaha yang relatif banyak menyerap pekerja sektor informal daerah perkotaan adalah : Perdagangan (43%), Jasa-Jasa (17%), Angkutan (10%), Bangunan (8%), dan Kerajinan Rakyat (7%). Dengan demikian, enam dari sepuluh pekerja di sektor informal kota berhubungan dengan kegiatan perdagangan dan jasa-jasa (terdiri dari jasa perorangan seperti tukang cukur dan pembantu rumah tangga, jasa masyarakat seperti bidan dan guru agama, dan jasa usaha seperti calo dan reparasi). Kegiatan tersebut ditambah

dengan kegiatan perdagangan "eceran" sektor formal merupakan jalur ekonomi yang sangat strategis yang menghias ekonomi kota. Pengaturan dan pembinaan kegiatan "perdagangan eceran" selalu berkaitan dengan "tata ruang" dan "waktu". Oleh karena itu, kunci keberhasilan pengaturan dan pembinaan kegiatan perdagangan eceran diperkotaan adalah perihal lokasi usaha dan waktu usaha. Dengan kebijaksanaan yang kondusif terhadap perdagangan eceran maka dengan sendirinya akan memberi insentif bagi perkembangan sektor informal angkutan dan kerajinan rakyat dan industri makanan (aspek pemasaran).

Sebuah eksperimen yang relatif berhasil tentang pola keterkaitan usaha antara sektor informal dan formal telah dilakukan oleh Pemda DKI di tahun 1988, yakni di Pasar Blok M Kebayoran Baru dimana terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara P.D.Pasar Jaya (pemilik bangunan pasar), Department Store Matahari (penghuni lantai 3), dan Pedagang Kios (penghuni lantai 1 dan 2).

Setelah berjalan dua tahun dari hasil pengamatan ternyata hanya 30% pengunjung yang ke Matahari berbelanja di toko serba ada sedangkan sisanya sebesar 70% berbelanja di lantai 1 dan 2 yang lebih murah. Dengan demikian di Pasar Blok M tsb tidak terdapat kompetisi yang tidak sehat bahkan justru sebaliknya yakni saling menguntungkan. Ini merupakan contoh pola keterkaitan yang berhasil yang perlu ditiru di lain pusat perbelanjaan.

Dengan pemberian tempat yang relatif permanen bagi kegiatan perdagangan dan jasa-jasa di sektor informal perkotaan maka di pusat-pusat kegiatan tadi dapat dibentuk suatu organisasi yang fungsinya membantu para anggotanya. Organisasi ini, penulis beri nama "Klinik Dagang". Organisasi ini dapat berupa LPSM atau koperasi. Dengan organisasi ini maka dapat dilakukan kontak dengan lembaga perbankan. Maksudnya ialah agar bank mempromosikan Klinik Dagang kepada para nasabahnya dengan harapan antara nasabah bank dengan organisasi tersebut dapat terjadi suatu transaksi usaha. Untuk efektifnya, maka nasabah dapat melakukan pembinaan "mutu" hasil produksi.

#### 10. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKSANAAN

Sebagai kata penutup, penulis ingin menghimbau kepada para perumus kebijaksanaan -- terutama di daerah perkotaan -- agar sedapat mungkin dihindari penggunaan istilah yang bersifat "terlalu umum" yang dapat mengundang berbagai macam penafsiran.

Selain itu, mengingat unit usaha yang berada di sektor informal bersifat "mandiri" dan para wiraswasta yang mengelola usaha tersebut memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, maka dalam tahapan implementasi kebijaksanaan sangat diperlukan perhatian terhadap aspek komunikasi yang efektif.

Kehadiran sektor informal dalam percaturan ekonomi Indonesia sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan dan kebijaksa-

naan kesempatan kerja. Diperkirakan bahwa dalam periode pembangunan 25 tahun mendatang sektor informal masih tetap berperan terutama tenaga kerja yang berstatus sebagai swakarya.

Agar kedua sektor yakni yang formal dan informal dapat dijadikan "agent of development" maka perlu dikembangkan pola keterkaitan usaha yang saling menguntungkan. Program "Bapak Angkat" yang kini sedang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian patut dipakai sebagai contoh untuk dikembangkan di lain bidang.

Di hari mendatang penanganan sektor informal semakin harus diserahkan ke daerah tingkat II karena setiap lokasi mempunyai keunikan sendiri.

Mudah-mudahan makalah ini dapat merangsang para perumus kebijaksanaan untuk dapat melahirkan konsep-konsep kebijaksanaan tepat guna dalam menunjang peranan sektor informal.

#### 11. DAFTAR BACAAN

1. Agus Sumarno Idris dan Mulyamah Wignyadisastira [1986], Beberapa Karakteristik Sosial Ekonomi dan Demografis Golongan Migran ulang-alik ke Kodya Bandung, Laporan Penelitian PPSL Unpad No.92.
2. Biro Pusat Statistik [1986], Pekerja Sektor Informal di Indonesia, Laporan No.03310.8602, Februari.
3. Darmawan, Rusli Ghalib dkk. [1979], Penelitian Sosial Ekonomi Golongan Ekonomi Kecil di Sektor Informal di daerah Pedesaan : Kasus Jawa Barat, Laporan Penelitian PPSL Unpad No.27.

4. Chapman, Barbara Anne [1984], Makanan Jadi Indonesia : Peranan Pedagang Kecil dalam Suplai Makanan Masyarakat Kota, Equity Policy Center, Washington D.C.
5. Geertz, Clifford [1963], Agricultural Involution : The Process of Ecological Change in Indonesia, University of California Press, Los Angeles.
6. Hidayat [1976a], Growth and Utilization of Manpower in Indonesia, The Philippine Economic Journal, No.30, December.
7. ----- [1976b], Kerangka Dasar Strategi Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Pendekatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, No.4, Desember.
8. ----- [1978], Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, No.4, Desember.
9. ----- [1980], Development of the Informal Sector within ASEAN : Problems and Prospects, published as Chapter Two in Mokhzani, Hoong, and Wells (eds.), ASEAN Economic Cooperation and The New International Economic Order, Malaysian Economic Association, Kuala Lumpur.
10. ----- [1981], Peranan dan Fungsi Pedagang Pengusaha Kecil dalam Perekonomian Kota, Widyapura, No.6, Tahun 111, November
11. ----- [1982a], Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia, Prisma, No.4, April.
11. ----- [1982a], Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia, Prisma, No.4, April.
12. ----- [1982b], Small and Medium Enterprises Development in Indonesia : An Overview, Fisme Review, No.6, Vol.2, June, New Delhi.
13. ----- [1982c], Pembinaan Potensi dan Sumber Daya dalam rangka Peningkatan Taraf Hidup 'Gelandangan', Widyapura, No.1, Tahun 1V, Agustus.
14. ----- [1983a], Situasi Pekerjaan, Setengah Pengangguran, dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal, prasaran disampaikan dalam "Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja", diselenggarakan bersama oleh Kantor Meneg Riset dan Teknologi, BKKBN, Leknas-LIPI, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertempat di Hotel Horizon, Jakarta, 12-15 Januari.
15. ----- [1983b], Wanita dan Sektor Informal : Peranan dan Permasalahannya, Sumber Daya Manusia, No.3, Tahun 1.

16. ----- [1983c], Definisi, Kriteria, dan Evolusi Konsep Sektor Informal : Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV, Analisa, No.7, Juli.
17. ----- [1985], Urbanisasi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, bahan ceramah di "Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Perumahan tingkat Nasional", diselenggarakan oleh Dep.PU, di Bandung, November.
18. ----- [1986a], Growth, Employment, and Productivity : A Macro Perspective, paper presented at the "Fifth World Productivity Congress", held in Jakarta, April.
19. ----- [1986b], Overview of the Problems and Implementation of Programs dealing with the Urban Informal Sector, paper presented at the "International Conference on Local Resource Management for Livelihood Security and Livelihood Enhancement", co-sponsored by IDRC (Canada), ITB, and Kantor Meneg KLH, held in Bandung, 19-22 May.
20. ----- [1987a], Bisnis Retail, Sektor Informal, dan Bank, Infobank, No.85, Vol.IX, Januari.
21. ----- [1987b], Posisi dan Peranan Strategis Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional, Majalah Tripartit, Februari.
22. ----- [1987c], Peranan dan Profil serta Prospek Perdagangan Eceran (Formal dan Informal) dalam Pembangunan, Prisma, No.7, Juli.
23. ----- [1988], Posisi dan Peranan Strategis Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia, makalah disampaikan dalam "Seminar Mobilitas Penduduk dan Sektor Informal", diselenggarakan oleh UGM, di Yogya, 8-9 Februari.
24. Hidayat, Armyun Rangkuti dkk. [1980], Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sektorial dalam bidang Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Kerja serta Pendapatan, Laporan Penelitian PPSL Unpad No.47.
25. International Labour Office [1972], Employment, Incomes, and Equality : A Strategy for increasing Productive Employment in Kenya.
26. ----- [1984], Urbanisation, Informal Sector and Employment : A Progress Report on Research, Advisory Services and Technical Cooperation, World Employment Programme, April.
27. Kannappan, Subbiah ed. [1977], Studies of Urban Labour Market behaviour in Developing Areas, International Institute for Labour Studies, Geneva.
28. Kompas [1985], Penelitian 'Kompas' tentang Pola Dagang K-5, 13 Oktober



29. LPEM Fekon UI [1979], Golongan Ekonomi Kecil : Pedagang Kaki Lima dan Tukang Becak di beberapa kota di Luar Jawa, Desember.
30. Moir, Hazel V.J. dan Sucipto Wirodarjono [1977], Sektor Informil di Jakarta, Widyapura, No.9-10, Tahun I.
31. Mulyamah Wignyadisastra, Agus Sumarno Idris, dan Suropto Samid [1981], Peningkatan Pemungutan, Monitoring, dan Pengelolaan Retribusi Usaha Kaki Lima di Wilayah DKI Jakarta, Laporan Penelitian PPSL Unpad No.50-3-81.
32. Oshima, H.T. and Hidayat [1974], Differences in Labor Utilization Concepts in Asian Censuses and Surveys and Suggested Improvements, Council for Asian Manpower Studies, Discussion Paper No.74-06, Manilla.
33. Scoville, James G. [1985], The Traditional Industrial Sector in Developing Countries : An up-date on its role and functioning, mimeo, April.
34. SEACAN [1984], Unorganised Money Markets in the SEACAN Countries, mimeo.
35. Sethuraman S.V. ed. [1981], The Urban Informal Sector in Developing Countries, World Employment Programme, ILO.
36. ----- [1985a], Urbanisation, Informal Sector, and Employment, Working Paper, World Employment Programme Research, ILO, January.
37. ----- [1985b], Informal Sector in Indonesia : An Assessment of Policies, World Employment Programme, ILO, September.
38. Sudomo [1986], Sektor Informal harus Dilindungi, Harian Kompas, Rabu, 20. Agustus.
39. van Dyk, Meine Pieter [1980], De Informele Sector van Quagadougou en Dakar, Academisch Proefschrift, Graad van Doctor, Vrije Universiteit Amsterdam.